

2025

JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH

P - ISSN 2087-9776
E - ISSN 2715-3134

JAM

Vol. 15 No. 2
Edisi: Juli – Desember 2025



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

1. ANALISIS KINERJA PASAR MODAL ASEAN DENGAN PASAR MODAL INDONESIA DI BURSA EFEK INDONESIA
Bella Gusrina, Surna Lastri, Dessy Purnama Sari
2. PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESSES PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMD) AIR MINERAL SE WILAYAH ACEH DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN Z-SCORE
Cut Fitrika Syawalina, Mulyadi, Amanda Frizka, M. Azril
3. PENGARUH SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
Almira Keumala Ulfah, Ramadhan, Trie Nadilla, Muhammad Syafri, Awis Hardhito
4. PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SE SUMATERA
Eva Susanti, Yuslana, Aulia Anna Zhira, Siti Nurhilani
5. ANALISIS PERBANDINGAN NPM DAN ROA PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUMN DAN SWASTA DI INDONESIA
Radja, Dewi Maya Sari, Rizki Ramadhan, Mutia Arfiani
6. PENGARUH KAPASITAS DAN KOMPETENSI KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH
Irmawati, Surya Fatma, Rizki Maulidia
7. PENGARUH INTEGRITAS, LOCUS OF CONTROL, KOMPETENSI DAN KOMPENSASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR
Zulkifli Umar, Budi Safatul Anam, Nafis Muhammad Akbar
8. PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN ETNIS TIONGHUA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Elviza, Fathul Khaira, Roslinawati
9. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN : EVALUASI INTERNAL CONTROL DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI
Maya Agustna, Fitri Yunina, Saifa Mirja Cofa, Yuslaidar Yusuf
10. PENGARUH JUMLAH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KONDISI POLITIK TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2023
Syamsidar, Emmi Suryani Nasution, Syifaun Nazla, Nikita Winna
11. PENERAPAN METODE FULL COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA USAHA KULINER PANCONG BECEK
Riki Aditya, Dewi Maya Sari, Totok Rudianto, Mutia Arfiani, Rizki Ramadhan

JAM

VOLUME
15

NOMOR
2

HALAMAN
1 - 160

BANDA ACEH
2025

P-ISSN 2087-9776
E-ISSN 2715-3134

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Jurnal	
1. ANALISIS KINERJA PASAR MODAL ASEAN DENGAN PASAR MODAL INDONESIA DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Bella Gusrina, Surna Lastri, Dessy Purnama Sari</i>	1 – 14
2. PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESSES PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMD) AIR MINERAL SE WILAYAH ACEH DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN Z-SCORE <i>Cut Fitrika Syawalina, Mulyadi, Amanda Frizka, M. Azril</i>	15 – 28
3. PENGARUH SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA <i>Almira Keumala Ulfah, Ramadhan, Trie Nadilla, Muhammad Syafri, Awis Hardhito</i>	29 – 40
4. PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SE SUMATERA <i>Eva Susanti, Yuslana, Aulia Anna Zhira, Siti Nurhilani</i>	41 – 55
5. ANALISIS PERBANDINGAN NPM DAN ROA PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUMN DAN SWASTA DI INDONESIA <i>Radja, Dewi Maya Sari, Rizki Ramadhan, Mutia Arfiani</i>	56 – 67
6. PENGARUH KAPASITAS DAN KOMPETENSI KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH <i>Irmawati, Surya Fatma, Rizki Maulidia</i>	68 – 85
7. PENGARUH INTERGITAS, LOCUS OF CONTROL, KOMPETENSI DAN KOMPENSASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR <i>Zulkifli Umar, Budi Safatul Anam, Nafis Muhammad Akbar</i>	86 – 99
8. PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN ETNIS TIONGHUA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR RITEL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA <i>Elviza, Fathul Khaira, Roslinawati</i>	100 – 113
9. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN : EVALUASI INTERNAL CONTROL DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI <i>Maya Agustina, Fitri Yunina, Saifa Mirja Cofa, Yuslaidar Yusuf</i>	114 – 125
10. PENGARUH JUMLAH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KONDISI POLITIK TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2023 <i>Syamsidar, Emmi Suryani Nasution, Syifaun Nazla, Nikita Winna</i>	126 – 143

**11. PENERAPAN METODE FULL COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK
PRODUKSI PADA USAHA KULINER PANCONG BECEK**

Riki Aditya, Dewi Maya Sari, Totok Rudianto, Mutia Arfiani, Rizki Ramadhan 144 – 160

**Pengaruh Kapasitas Dan Kompetensi Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

**The Influence Of Village Head Capacity And Competence On Village Fund Management In
Baiturrahman District, Banda Aceh City**

Irmawati^{1*}, Surya Fatma², Rizki Maulidia³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Kota Banda Aceh

*e-mail korespondensi: irmawati@unmuha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas dan kompetensi kepala desa terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh baik secara parsial maupun secara simultan. Data penelitian dikumpulkan melalui daftar kuisioner. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji-t dan uji-F dimaksud untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian antara variabel kapasitas dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Kemudian pengujian secara parsial yaitu kapasitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan kompetensi juga berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: *Kapasitas, Kompetensi, Pengelolaan Dana Desa*

Abstract

This study aims to examine the influence of village head capacity and competence on village fund management in Baiturrahman District, Banda Aceh City, both partially and simultaneously. Data were collected through a questionnaire. Hypothesis testing used multiple linear regression analysis, t-tests, and F-tests to determine the partial and simultaneous effects of independent variables on the dependent variable at a 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The sample size for this study was 40

respondents. The results showed that capacity and competence simultaneously influenced village fund management in Baiturrahman District, Banda Aceh City. Furthermore, partial testing demonstrated that capacity influenced village fund management in Baiturrahman District, and competence also influenced village fund management in Baiturrahman District, Banda Aceh City.

Keywords: *Capacity, Competence, Village Fund Management*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu isu krusial dalam pembangunan wilayah pedesaan, khususnya di negara yang menganut sistem otonomi daerah seperti Indonesia. Alokasi dana desa dari pemerintah pusat ditujukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur desa. Namun, keberhasilan pemanfaatan dana ini sangat ditentukan oleh kepala desa sebagai pengambil kebijakan dan pengelola utama.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 dan 2, Keuangan Desa didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang, barang, serta aset lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa. Hak dan kewajiban ini meliputi empat komponen utama: pendapatan (sumber penerimaan seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa/ADD, dan hasil usaha desa), belanja (penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat), pembiayaan (pengelolaan surplus atau defisit anggaran), serta pengelolaan keuangan (prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban).

Pendapatan desa diperoleh dari berbagai sumber yang diatur secara legal. Pertama, Pendapatan Asli Desa (PADes) mencakup hasil usaha desa, pendapatan dari pengelolaan aset milik desa, swadaya masyarakat melalui gotong royong, serta sumber lain yang sah. Kedua, desa menerima alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program-program nasional yang didistribusikan secara merata dan adil. Ketiga, pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan minimal 10% dari penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk desa. Keempat, dana desa juga bersumber dari bagian dana perimbangan kabupaten/kota, dengan porsi minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, desa dapat menerima bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta pendapatan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengingat besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa serta kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan keuangan desa, pemerintah desa seharusnya mampu meningkatkan transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas dalam mengelola dan menjalankan proses keuangan tersebut. Pengelolaan keuangan desa menggunakan Basis Kas, yang berarti pencatatan transaksi dilakukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening desa. Lebih lanjut, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan (penyusunan anggaran sesuai kebutuhan prioritas), pelaksanaan (penyaluran dana untuk program pembangunan), penatausahaan (pencatatan dan administrasi keuangan), pelaporan (penyusunan dokumen kinerja keuangan), hingga pertanggungjawaban (pemeriksaan dan evaluasi oleh pihak berwenang dan masyarakat).

Pengelolaan dana desa di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan kesempatan besar bagi desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan dana desa sering menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa adalah kapasitas kepala desa. Kapasitas ini meliputi pengetahuan, keterampilan manajerial, pengalaman, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Di Kecamatan Baiturrahman, kepala desa dan aparatur pemerintahan desa belum maksimal dalam menerapkan Permendagri yang mewajibkan pengelolaan serta proses pelaksanaan keuangan Gampong harus transparan kepada seluruh masyarakat di Gampong. Karena kurangnya pemahaman atas penerapan peraturan tersebut maka pemerintah desa tidak memperdulikan aturan yang telah dibuat tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa yang seharusnya sehingga menggunakan anggaran yang disalurkan oleh pemerintah tidak sesuai prosedur yang tercantum dalam permedagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dan Aparatur pemerintahan desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh telah menerapkan seluruh pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 namun terjadi masalah pada laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Dimana pemerintah desa tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan. Fenomena permasalahan yang sering ditemukan dalam pengelolaan dana desa meliputi kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Sebuah studi oleh Hidayat, et al. (2021) dalam Jurnal Administrasi Publik menemukan bahwa kepala desa yang memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan cenderung lebih mampu menghindari masalah-masalah tersebut, sementara kepala desa yang kurang terampil sering kali mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hidayat et al., 2021).

Dengan meninjau kontribusi kapasitas dan kompetensi kepala desa dalam pengelolaan dana desa serta berbagai kendala yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kedua faktor tersebut menjadi penentu keberhasilan pengelolaan dana desa di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menyajikan hasil komprehensif terkait tantangan pengelolaan dana desa, tetapi juga menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

LANDASAN TEORI

Teori Sinyal

A. Desa Dan Pemerintahan Desa

Pengertian Desa

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang khas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Mardikanto (2018:33) mengemukakan bahwa desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan pemerintahan secara mandiri.

Sedangkan menurut hukum UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Suharto (2019:7), desa adalah tempat dimana interaksi sosial antarwarga masyarakat berlangsung secara intensif, sehingga membentuk solidaritas dan identitas komunitas. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal.

Dari segi ekonomi, desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Menurut Rahmawati (2020:27) desa merupakan basis produksi yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi desa, seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan, menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pengertian desa tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang saling terkait.

Suyanto (2019:44) menjelaskan bahwa desa diartikan sebagai komunitas yang memiliki struktur sosial yang sederhana, di mana hubungan antarwarga masyarakat berlangsung secara langsung dan akrab. Pentingnya interaksi sosial dalam membangun solidaritas dan kerjasama di antara anggota masyarakat desa. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi lokal.

Dengan demikian, pengertian desa menurut para ahli mencakup dimensi sosial, budaya, dan ekonomi

yang saling terkait. Desa bukan hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga merupakan komunitas yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Pengertian Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa (atau sebutan lain) yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan. Kepala desa, sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam posisinya, kepala desa berperan ganda: sebagai perwakilan negara yang paling dekat dengan masyarakat dan sebagai figur pemimpin yang mengayomi warga. Tugas utama kepala desa mencakup mengelola pemerintahan desa, menjalankan program pembangunan, membina hubungan sosial kemasyarakatan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Mardikanto (2018:54) mendefinisikan pemerintahan desa sebagai sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa yang dijalankan oleh kepala desa beserta perangkatnya, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintahan desa bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Soetardjo (2019:74) menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai lokal. Pemerintahan desa berperan sebagai mediator antara negara dan masyarakat, serta bertanggung jawab atas pelayanan publik dan pembangunan partisipatif.

Prasetyo dan Wulandari (2020:24) menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan entitas yang menjalankan fungsi administratif, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur secara moneter, termasuk aset berupa uang atau barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian aktivitas terstruktur, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, administrasi keuangan, penyusunan laporan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung implementasi otonomi daerah, pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah regulasi yang saling terkait, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan

Menteri. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum bagi desa untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 guna memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Kapasitas

Pengertian Kapasitas

Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan Analoui, 2014). Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu-individu suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama sesuai aturan-aturan yang berlaku. (Islami, 2016).

Menurut Soeprpto (2010:10), “kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu”. Selanjutnya Madiyono (2016:20) menyatakan bahwa kapasitas dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Dalam pengertian yang lebih luas, yang sekarang digunakan dalam pembangunan masyarakat, kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang. Kapasitas sebagai kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki seseorang, organisasi. Lembaga, dan masyarakat secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai tujuan (Raharjo, 2021:73-74). Organisasi yang memiliki kapasitas kepemimpinan disinyalir akan berdampak pada kinerja organisasi. Kapasitas kepemimpinan dapat melakukan proses pengembangan kapasitas individu, organisasi dan sistem yang dimiliki organisasi (Darmin, 2017:66).

Di dalam *Jurnal Of Indonesia Public Administration And Governance Studies* (JIPAGS) dikatakan bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sehingga kemampuan yang

dimiliki SDM dapat mengoptimalkan penerapan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dapat menjalankan roda organisasi, dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan. Dalam konteks kapasitas kebijakan dana desa dimaknai bagaimana para pelaku atau pengelola kebijakan dana desa dapat pengembangan, inovasi dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas sering digunakan ketika berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang dan kapasitas juga tidak hanya berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan individu tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif. Kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sehingga kemampuan yang dimiliki SDM dapat mengoptimalkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dapat menjalankan roda organisasi.

C. Kompetensi

Pengertian Kompetensi

Munawir (2017:33) mengatakan berdasarkan definisi tersebut mengandung makna Kompetensi merupakan aspek intrinsik dari kepribadian individu yang bersifat mendalam dan melekat, serta tercermin dalam perilaku yang konsisten dan terukur di berbagai situasi dan tanggung jawab pekerjaan. Kompetensi yang perlu dimiliki oleh sumber daya manusia harus dirumuskan secara terukur dan spesifik agar dapat dievaluasi, sebagai cerminan nyata dari pelaksanaan tugas yang didasarkan pada pengalaman nyata. Penilaian atas pencapaian kompetensi harus dilaksanakan secara objektif, berdasarkan evaluasi kinerja aktual pegawai dalam organisasi, dengan mempertimbangkan bukti penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang terbentuk melalui proses pembelajaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017 pasal 1 tentang kompetensi, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Simamora (2017) mengatakan bahwa kompetensi adalah jenis keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunaikan sebuah pekerjaan secara efektif'. Faktor kompetensi yang meliputi kesesuaian pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas akan memberikan

dampak pada kinerja sebagai perwujudan prestasinya. Semakin tinggi kesesuaian kompetensi seseorang dalam bidang tugasnya akan semakin tinggi tingkat kinerjanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2) terhadap pengelolaan dana desa (Y). Menurut Sugiyono (2018), penelitian asosiatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji secara empiris.

Penelitian ini dilaksanakan pada sepuluh desa di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, yaitu Ateuk Deah Tanoh, Ateuk Jawo, Ateuk Munjeng, Ateuk Pahlawan, Kampung Baru, Neusu Aceh, Neusu Jaya, Peuniti, Seutui, dan Sukaramai. Lokasi tersebut dipilih karena mewakili karakteristik pengelolaan dana desa yang beragam dan relevan dengan tujuan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari Februari hingga Juli 2025 dengan desain *one shot study*, yaitu pengumpulan data dilakukan satu kali pada periode tertentu (Sekaran, 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa, dan pegawai pada sepuluh kantor desa di Kecamatan Baiturrahman yang berjumlah 40 orang. Karena jumlah populasi kurang dari 100, seluruh populasi dijadikan sampel dengan metode sensus (Arikunto, 2019). Dengan demikian, penelitian ini melibatkan 40 responden sebagai unit analisis individu.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan, dengan skor 1 untuk “sangat tidak setuju” hingga 5 untuk “sangat setuju” (Sekaran, 2017). Variabel yang digunakan terdiri dari pengelolaan dana desa (Y) sebagai variabel dependen, serta kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2) sebagai variabel independen. Definisi operasional setiap variabel dirinci sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan dana desa diukur melalui indikator perencanaan partisipatif, pelaksanaan anggaran yang efektif, penatausahaan keuangan yang akurat, pelaporan yang transparan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel;
- (2) Kapasitas diukur melalui kualitas perencanaan strategis, efektivitas alokasi anggaran, dan kecepatan pengambilan keputusan;

(3) Kompetensi diukur melalui kemampuan, keterampilan, pemahaman, dan pengetahuan aparatur desa.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Dana Desa

X₁ = Kapasitas

X₂ = Kompetensi

α = konstanta

b₁, b₂ = koefisien regresi

e = error term.

Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan instrumen pengumpulan data layak digunakan. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi *product moment*, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dengan batas keandalan $\geq 0,60$ (Sekaran, 2017). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (*t-test*) dan simultan (*F-test*) pada tingkat signifikansi 5%. Hasil uji digunakan untuk menentukan pengaruh kapasitas dan kompetensi kepala desa terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

HASIL ANALISIS

Pengujian Data

Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of correlation* dengan bantuan SPSS. Data dikatakan valid apabila hasil uji $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas. Atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Hasil uji validitas dalam penelitian dapat dilihat pada

tabel 4.8 dibawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Validitas Kuesioner Penelitian

No	Variabel	Indikator	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Hasil Uji
1	Pengelolaan Dana Desa (Y)	1. Perencanaan Partisipatif.	0,851	0,320	Valid
		2. Pelaksanaan Anggaran yang Efektif.	0,940	0,320	Valid
		3. Penatausahaan Keuangan yang Akurat.	0,803	0,320	Valid
		4. Pelaporan yang Transparan.	0,826	0,320	Valid
		5. Pertanggungjawaban yang Akuntabel.	0,831	0,320	Valid
2	Kapasitas (X ₁)	1. Kualitas Perencanaan Strategis.	0,689	0,320	Valid
		2. Efektivitas Alokasi Anggaran.	0,721	0,320	Valid
		3. Kecepatan Pengambilan Keputusan.	0,551	0,320	Valid
3	Kompetensi (X ₂)	1. Kemampuan	0,842	0,320	Valid
		2. Keterampilan	0,838	0,320	Valid
		3. Pemahaman	0,812	0,320	Valid
		4. Pengetahuan	0,881	0,320	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien kerelasi nilai r_{Hitung} lebih besar daripada nilai r_{Tabel} yaitu sebesar 0,320 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang digunakan adalah teknik analisis *Cronbach's Alpha*. Instrumen penelitian (kuesioner) dapat dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai $\alpha \geq 0,60$. Pengujian Reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Nilai Uji Reabilitas	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,942	0,60	Handal
2.	Kapasitas (X ₁)	0,799	0,60	Handal
3.	Kompetensi (X ₂)	0,932	0,60	Handal

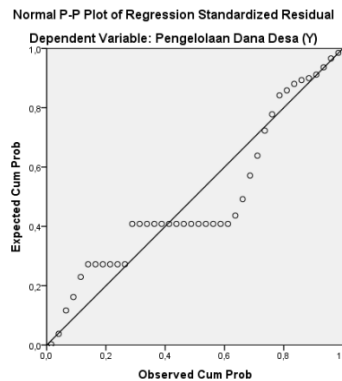
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, maka didapatkan nilai reliabilitas untuk variabel pengelolaan dana desa (Y) dengan nilai 0,942, kapasitas (X₁) dengan nilai 0,799, dan kompetensi (X₂) dengan nilai 0,932. Seluruh variabel dalam instrumen penelitian ini memiliki nilai nilai reliabilitas tes lebih besar dari nilai *cronbach's alpha* yaitu 0,60. Hal ini berarti bahwa bahwa kuesioner penelitian yang digunakan memenuhi syarat atau reliabel/handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui analisa grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Data yang normal ditandai dengan sebaran titik-titik data diseperti garis diagonal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis dari grafik diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.10:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,468	2,137	Non Multikolinieritas
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,468	2,137	Non Multikolinieritas

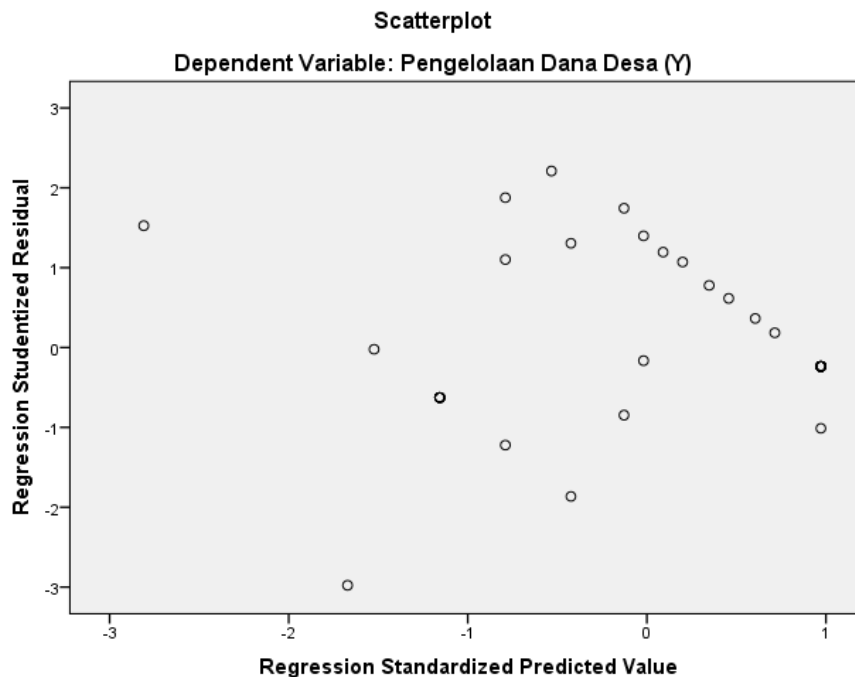
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas maka dapat diketahui bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai toleransi yang kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada

satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2:



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2025)

Gambar 4.2
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Dari Gambar 4.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Current ratio* terhadap Nilai Perusahaan

A. Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2) terhadap pengelolaan dana desa (Y). Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Berganda

Nama Variabel	B	Std Error	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Konstanta	2,786	2,133	1,306	2,026	0.199
Kapasitas (X ₁)	0,775	0,224	3,456	2,026	0,001
Kompetensi (X ₂)	0,544	0,140	3,886	2,026	0,000

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas terlihat bahwa data output dari analisis regresi linier berganda yang dianalisis menggunakan SPSS maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,786 + 0,775X_1 + 0,544 X_2$$

Persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut:

1. Koefisien Regresi (β)
 - a. Nilai konstanta adalah 2,786 artinya bila mana kapasitas (X₁), dan kompetensi (X₂) dianggap konstan, maka tingkat pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah sebesar 2,786 satuan.
 - b. Koefisien regresi kapasitas (X₁) sebesar 0,775. Artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam variabel kapasitas secara relatif akan meningkatkan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebesar 0,775 satuan dengan asumsi variabel kompetensi (X₂) dianggap konstan.
 - c. Koefisien regresi kompetensi (X₂) sebesar 0,544. Artinya setiap kenaikan 1 satuan dalam variabel kompetensi secara relatif akan meningkatkan pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebesar 0,544 satuan dengan asumsi variabel kapasitas (X₁) dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa dari ke dua variabel yang diteliti ternyata variabel kapasitas (X₁) mempunyai pengaruh dominan dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh karena diperoleh koefisien regresi sebesar 0,775 satuan.

2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.12
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,854 ^a	0,729	0,715	1,324

a. Predictors: (Constant), Kompetensi (X₂), Kapasitas (X₁)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan dari output komputer diatas maka diperoleh koefisien korelasi dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,854^a dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 85,4%. Artinya faktor kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,715 artinya bahwa sebesar 71,5% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (pengelolaan dana desa) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan variabel kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2). Sedangkan selebihnya sebesar 28,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dua variabel yang telah dijelaskan di atas seperti kemampuan kerja, kepemimpinan manajerial, pengalaman kerja dan variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

A. Uji Parsial (Uji t)

Untuk menguji pengaruh kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2) terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh secara parsial digunakan uji Statistik t (uji-t). Apabila nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya apabila nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.11. Dapat ketahuai besarnya nilai t_{hitung} dari setiap variabel independen dalam penelitian ini. Nilai t_{hitung} dari setiap variabel independen akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$.

1. Pengaruh Kapasitas (X_1)

Pengaruh kapasitas (X_1) terhadap variabel pengelolaan dana desa (Y) secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.11 diatas, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3,456 lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar 2,026 ($3,163 \geq 2,026$), maka keputusannya adalah menerima H_{a1} dan menolak H_{01} . Dari hasil uji signifikansi secara parsial diketahui bahwa kapasitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

2. Pengaruh Kompetensi (X_2)

Pengaruh kompetensi terhadap variabel pengelolaan dana desa (Y) secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.11 diatas, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 3,886 lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu sebesar 2,026 ($3,886 \geq 2,040$), maka keputusannya adalah menerima H_{a1} dan menolak H_{01} . Dari hasil uji signifikansi secara parsial diketahui bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

B. Uji Simultan (Uji F)

Untuk menguji pengaruh kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2) terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh secara simultan digunakan uji Statistik F (uji F). Apabila nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya apabila nilai $F_{hitung} < \text{nilai } F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.
1	Regression	174,652	2	87,326	49,825	3,252	,000 ^b
	Residual	64,848	37	1,753			
	Total	239,500	39				

Sumber: Hasil Penelitian, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 49,825 dengan signifikansi 0,000, sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 3,252. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , maka F_{hitung} (49,825) lebih besar dari F_{tabel} (3,252). Keputusannya adalah H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak, artinya secara simultan variabel kapasitas (X_1), dan kompetensi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kapasitas (X_1) dan kompetensi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
2. Kapasitas (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
3. kompetensi (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa pada Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

REFERENSI

Darmin, T., Sari, D., & Prasetyo, A. 2017. *Kapasitas Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi: Studi Kasus di Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hidayat, A., Nasution, M., & Lestari, F. 2021. Pengaruh kapasitas kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*.

Islami, U. 2016. Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou

John C. Maxwell. 2019. *Leadershift* (Terjemahan). Jakarta : PT. Gramedia.

Madiyono, Imam. 2016. Kapasitas perangkat desa teluk bakau kecamatan gunung kijang dalam mengelola alokasi dana desa.

Mardikanto, T. 2018. *Kepemimpinan dan Kapasitas Kepala Desa dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardikanto, T. 2018. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.

Mardikanto, T. 2018. *Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Rajawali Press.

Mouallem, L.E & Analoui, F. 2014. *The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related*.

Mulyadi. 2019. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Munawir. 2017. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 4*. Yogyakarta: Liberty

Oktari, R. & Agustina, L. 2024. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017 pasal 1 tentang *Kompetensi*.

Prasetyo, A. & Wulandari, R. 2020. Efektivitas pemerintahan desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45-60.

- Raharjo, M. M. 2021. *Tata Pengelolaan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahmawati, N. 2020. Analisis pengelolaan dana desa di kabupaten z. *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, R. 2020. Pengaruh kompetensi kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Sekaran, Uma. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Simamora, H. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada
- Soekanto, S. 2017. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeprapto, Riyadi. 2010. The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word bank.
- Soetardjo, A. 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono,(2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suharsimi, A.. (2018). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suharto, A. 2019. Peran sosial desa dalam pembangunan masyarakat". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 123-135.
- Suyanto, A. 2019. *Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Widiastuti, R. 2021. Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*.